



Ketua Masyarakat Peduli Peningkatan Prestasi Olahraga Yogyakarta

## Jelang Porda, Membina Olahraga Prestasi tanpa KONI

Perpres No. 86 Tahun 2021 mengatur soal desain besar olahraga nasional atau disingkat DBON. Berdasarkan DBON itu memuat arah dan kebijakan pengembangan keolahragaan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi dan industri olahraga.

**DALAM** kesempatan ini penulis fokus pada pengembangan olahraga prestasi. Fungsi DBON memberikan pedoman bagi pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, organisasi induk, cabang olahraga dan dunia usaha. Kemudahan industri, akademisi, media serta masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga nasional.

Pendanaan yang diperlukan DBON bersumber dari APBN, APBD provinsi, kabupaten dan

kota dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. Di pusat menteri menyalurkan pendanaan olahraga prestasi ke induk organisasi cabang olahraga dan NPC.

Dari uraian di muka, penulis tertarik dengan pembinaan olahraga prestasi pada Pemkot Jogja yang pendanaannya melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Jogja. Terutama berkaitan dengan agenda Pekan Olahraga Daerah (Porda) yang dihelat di Sleman pada 1 hingga 9 September 2022 ini.

Selama lima tahun terakhir, KONI Kota Jogja gonia ganti ketua umum sampai lima kali. PORDA 2017 perolehan medali terpunuk. Ketua umum KONI mundur. Digantikan Tri Djoko Susanto (TDS) yang direkomendasikan Wali Kota Haryadi Suyuti (HS). KONI digelontor dana Rp21 miliar untuk mengikuti Porda 2019. Kota Jogja menjadi tuan rumah. Hasilnya target juara umum meleset. TDS memilih mundur dari jabatan ketua umum KONI. Selama persiapan menjadi tuan rumah hingga



Oleh:  
Drs Sukanto

gagal menjadi juara umum, anggaran yang dibelanjakan KONI relatif besar. Ada sejumlah belanja yang patut diduga tidak sesuai aturan. Misalnya belanja barang jasa baik ke atlet atau lainnya. Ada belanja barang Rp 700 juta tanpa label.

Honor pengurus KONI setiap bulan sudah ada. Oleh ketua umum diterbitkan SK panitia agar kembali mendapatkan honor. Totalnya pada 2019 honor pengurus KONI dan panitia yang dibentuk mendekati Rp 2 miliar. Di luar

itu ada laporan ketua umum masih mendapatkan berbagai fasilitas yang beragam.

Beruntung meski telah mundur beberapa tahun lalu, aparat penegak hukum (APH) tidak pernah tertarik dengan KONI. Terima kasih penulis ucapkan. Ini berarti KONI Kota Jogja tidak punya masalah hukum.

Kini menjelang Porda di Sleman, kita berharap ketua Umum KONI Kota Jogja mampu membuat sejarah. Meski selama ini dibayangi 25 persen pengurus KONI impor dari kabupaten tetangga. Kemudian ada kelesuan di pembinaan olahraga bulutangkis. Peraih medali emas 2019, informasinya memilih mogok. Tidak mau bertanding. Ini menyusul keputusan ketua PBSI Kota Jogja mengimpor atlet putri bulutangkis dari Jakarta.

Sedangkan atlet putra diambil dari Jawa Tengah. Ada juga atlet yang sesungguhnya belum layak tanding. Namun tetap dipilih karena faktor putra salah satu pelatih. Semua kondisi ini tak lepas dari tanggung jawab ketua umum KONI. Bila dalam Porda 2022, Kota

Jogja kembali gagal meraih juara umum, sebaiknya ketua umum KONI mundur.

Dari uraian itu, penulis ingin bertanya bagaimana nantinya surat pertanggungjawaban (SPJ) atlet yang tidak pernah datang mengikuti program latihan. Ingat anggaran pembinaan berasal dari uang negara.

Berkaca dari banyak hal tersebut, penulis urun rembug dan memberikan masukan ke Pemkot Jogja. Sebaiknya pembinaan olahraga prestasi dilakukan dengan berpegang teguh pada Perpres No. 86 Tahun 2021 tentang DBON. Konsekuensinya pembinaan olahraga prestasi dilakukan tanpa lagi melibatkan KONI Kota Jogja.

Lewat tulisan ini penulis mengajak atlet bulutangkis, pelatih maupun orang tua atlet untuk menghentikan tindakan ketua PBSI Kota Jogja. Kita tolak kehadiran atlet impor dari Jakarta dan Jawa Tengah.

Jayalah atlet, pelatih dan olahraga di DIY. Selamat bertanding dalam Porda. (\*\*\*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005